



PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PEMALANG

Anies Iqbal Mustofa

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Accountability

Public Financial Manage-

ment

Pemalang Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna Laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan di Kabupaten Pemalang dengan metode pengumpulan data melalui survey kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, kemudian ditentukan sampel sebanyak 100 responden dari pengguna eksternal laporan keuangan yang meliputi DPRD, LSM, Pembayar pajak, dan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini berupa beberapa uji statistik. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saran yang bisa diberikan adalah untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan secara lengkap serta lebih melonggarkan akses laporan keuangan tersebut kepada publik, sehingga bisa tercipta sebuah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Abstract

This study aims to test empirically the effect of financial statement presentation and accessibility of financial statements to the accountability of financial management by the users of financial statements. The population in this study are external users of financial statements in Pemalang by the method of data collection through survey questionnaires. Sampling in this study used purposive sampling method, and then determined a sample of 100 respondents from external users of financial statements that include the Parliament, NGOs, taxpayers, and society. Analysis methods used in testing the hypothesis in this study a number of statistical tests. The results of hypothesis testing in this study shows that the financial statement presentation significant negative effect on financial management accountability, accessibility of financial statements have a positive and significant impact on local financial management accountability, as well as regional financial statement presentation and accessibility of financial statements together influential and significant impact on local financial management accountability. Advice can be given is to improve the presentation of financial statements in full and more relaxed access to the financial statements to the public, so it could create a financial management accountability better.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: anies@unnes.ac.id

Pendahuluan

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan yang dilakukan pemerintah terhadap tatanan ekonomi publik. Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Akuntabilitas membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Stanbury, 2003). Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pen-

gawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah telah terjadi reformasi yang mendasar yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian laporan keuangan daerah ini nampaknya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masalah lainnya yang timbul adalah kurangnya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara transparan (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara yang lainnya) nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga Karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al., 1985 dan stecollini 2002). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu, Peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang Jaya".

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya. Pengguna eksternal laporan keuangan merupakan masyarakat (stakeholders) di Kabupaten Pematang Jaya. Dalam penelitian ini pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dan ditentukan sampel sebanyak 130 responden dengan ketentuan 84 anggota DPRD, 17 Pembayar Pajak, 23 aktivis LSM dan 16 anggota masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari responden yang penulis gunakan, yaitu anggota DPRD, pegawai

Bawasda dan pembayar pajak badan yang berada di lingkungan Kabupaten Pematang. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk terjun sendiri dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk mendapatkan data yang relevan dan riil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan melakukan pengelolaan kuesioner untuk mendapatkan data. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif.

Pengujian hipotesis menggunakan signifikansi individual untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas dan signifikansi simultan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat dan Koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS, nilai koefisien determinasi terletak pada tabel *model summary* dan tertulis *R square*.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata persepsi mengenai Penyajian Laporan Keuangan (PLK) sebesar 12,92 dengan kriteria tidak bermasalah. nilai maksimum sebesar 15,00 dan nilai minimum sebesar 9,00, sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 1,45. Standart deviasi merupakan pencerminan dari penyimpangan data variabel 1,45, Artinya besar simpangan data pada PLK masih relatif lebih kecil dibandingkan nilai meannya sebesar 12,92. Apabila standart deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata maka dapat dikatakan bahwa simpangan data pada PLK relatif baik.

Analisis statistik deskriptif ini menyatakan bahwa rata-rata persepsi mengenai Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK) sebesar 13,04 dengan kriteria tidak bermasalah. nilai maksimum sebesar 15,00 dan nilai minimum sebesar 10,00 pada, sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 1,27. Standart deviasi merupakan pencerminan dari penyimpangan data variabel 1,27, Artinya besar simpangan data pada ALK masih relatif lebih kecil dibandingkan nilai meannya sebesar 13,04. Apabila standart deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata maka dapat dikatakan bahwa simpangan data pada ALK relatif baik.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan

website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (Kawedar, 2008).

Rata-rata persepsi mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) sebesar 12,90 dengan kriteria tidak bermasalah. nilai maksimum sebesar 15,00 dan nilai minimum sebesar 9,00, sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 1,20. Standart deviasi merupakan pencerminan dari penyimpangan data variabel 1,20, Artinya besar simpangan data pada APKD masih relatif lebih kecil dibandingkan nilai meannya sebesar 12,90. Apabila standart deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata maka dapat dikatakan bahwa simpangan data pada APKD relatif baik.

Penyajian Laporan Keuangan (PLK) mempunyai koefisien sebesar 0,238, dapat diartikan apabila PLK mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) akan mengalami penurunan sebesar 0,238. Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK) mempunyai koefisien sebesar 0,348, dapat diartikan apabila ALK mengalami kenaikan sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) akan mengalami penurunan sebesar 0,348.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap model regresi, Hipotesis pertama menyatakan bahwa Penyajian Laporan Keuangan (PLK) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) dengan nilai koefisien sebesar 0,238 dan nilai signifikan sebesar 0,038 (nilai signifikan < 0.05). dengan demikian H1 dapat diterima, maka ada pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (PLK) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD).

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik, aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Suatu proses inilah yang merupakan suatu media untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat

mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah, sehingga tercipta suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang berarti semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai kelayakan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PSAP, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima (menolak H₀).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Mulyana (2006) yang menyebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Serta sesuai dengan teori pada UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Akuntabilitas pengelolaan keuangan).

Hal ini juga senada dengan Steccolini (2002) meneliti mengenai hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas: apakah laporan tahunan tersebut

merupakan medium untuk akuntabilitas. Sampel penelitiannya adalah sejumlah pemerintah daerah di Italia. Analisis dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan aktual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda di Italia perlu dipertanyakan.

Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap model regresi, Hipotesis kedua menyatakan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan (PLK) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) dengan nilai koefisien sebesar 0.348 dan nilai signifikan sebesar 0,009 (nilai signifikan < 0.05). Dengan demikian H₂ dapat diterima, maka ada pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan (PLK) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD).

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang berarti semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai akses yang mudah oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian Hipotesis kedua dapat diterima (Menolak H₀).

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Mulyana (2006) yang menyebutkan bahwa Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah. Serta sinkron dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa suatu akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Hasil pengujian terhadap Hipotesis ketiga dapat dilihat pada nilai signifikansi pada 0,001 < 0,05 maka Hipotesis ketiga diterima. Hal ini

berarti penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga dapat diterima (menolak H₀).

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Mulyana (2006), Handayani (2008), dan Bambang Santoso (2010) yang menyatakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan sesuai teori yang menyatakan bahwa ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al., 1985 dan Stecolini 2002).

Hasil pengujian menunjukkan besarnya R square adalah 0,305 yang berarti bahwa 30,5% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 69,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

Agus Erwan P dan Dyan Ratih. 2009. Metode Pene-

litian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Yogyakarta : Gava Media.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.

Besley, Scott and R.L Meyer. 1997. "An Empirical Investigation Of Factor Affecting The Cash Conversion Cycle", Presented at the Annual Meeting Of The Financial Management Association. Las Vegas: Nevada.

Cooper, R. Donald dan Pamela S. Schindler. 2001. 7th Edition. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill Irwin.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Publik Di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: UNDIP.

Haryanto, *Akuntansi Sektor Publik*, 2007. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jones, D. B. 1985. *The Needs of Users of Governmental Financial Reports*. Government Accounting Standards Board.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2.pp. 65-78.

_____. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.

_____. Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. MPR-RI No.XV/MPR/1998. *Tentang penyelenggaraan otonomi daerah*.

_____. Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. *Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

_____. Inpres nomor 7 tahun 1999. *Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

_____. UU 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006.
_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?*. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002. <http://www.cergas.info>
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA. <http://www.unpan.org>.